



**JURNAL AGREGASI**  
**Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam**  
**Demokrasi**  
**Volume 9–Nomor 1, Mei 2021**



DOI: [10.34010/agregasi.v9i1.4121](https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

**DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH  
 PERBATASAN KALIMANTAN**

**Iman Surya<sup>1)</sup>, Budiman<sup>2)</sup>, Tengku Imam Syarifuddin<sup>3)</sup>, Niken Nurmiyati<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [tengku.imam.pasca18@mail.umy.ac.id](mailto:tengku.imam.pasca18@mail.umy.ac.id),  
[nikennurmia@gmail.com](mailto:nikennurmia@gmail.com), Telp: +6285345300792

**Abstrak**

Problem penelitian yang di angkat dalam tulisan ini yakni melihat bagaimana dampak desentralisasi pendidikan di kawasan perbatasan Pulau Kalimantan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana dampak kebijakan desentralisasi terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan. Hal ini didasari kepada fasilitas pendidikan seperti unit sekolah, tenaga pengajar, kesadaran masyarakat untuk bersekolah masih sangat memperhatikan. Sistem rekrutmen PNS yang terpusat menjadikan kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan tenaga pengajar di wilayah perbatasan. Buruknya pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan menyebabkan terjadinya hummand trafficking terhadap anak-anak, banyaknya masyarakat yang memilih eksodus, dan luntarnya nasionalisme anak-anak perbatasan yang bersekolah di Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan. Artinya, dampak yang dihasilkan masih cenderung negatif dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi di lapangan baik pembangunann fisik maupun non fisik.

**Kata kunci:** Desentralisasi, Pelayanan Pendidikan, Perbatasan Kalimantan.

**THE IMPACT OF DECENTRALIZATION ON EDUCATION SERVICES IN THE BORNEO BORDER  
 AREA**

**Abstract**

*The research problem raised in this paper is to see how the impact of education decentralization in the border area of Kalimantan Island. This study also aims to see how the impact of decentralization policies on education services in the Kalimantan border area. This research is a qualitative study using a literature study approach. The results of this study state that the implementation of decentralization has no significant effect on education services in border areas. This is based on the fact that educational facilities such as school units, teaching staff, and public awareness of going to school are still very apprehensive. The centralized civil servant recruitment system creates a separate obstacle*





**JURNAL AGREGASI**  
**Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam**  
**Demokrasi**  
**Volume 9–Nomor 1, Mei 2021**



DOI: [10.34010/agregasi.v9i1.4121](https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

*for local governments to facilitate the fulfillment of teaching staff in border areas. Poor education services in the border areas of Kalimantan have resulted in the occurrence of hummand trafficking against children, the large number of people who choose to exodus, and the fading of the nationalism of border children who attend school in Malaysia. This study concludes that the implementation of decentralization has no significant effect on education services in border areas. This means that the resulting impact tends to be negative by looking at various phenomena that occur in the field, both physical and non-physical developments.*

**Keywords:** *Decentralization, Education Services, Kalimantan Border..*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan satu negara Otonomi daerah pasca reformasi telah mengalami beberapa perubahan kebijakan. UU tentang Pemerintah Daerah dimulai dari UU No. 22 Tahun 1999, digantikan oleh UU No.32 Tahun 2004, dan digantikan kembali oleh UU No. 23 Tahun 2014 yang berlaku hingga sekarang. Kewenangan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sebenarnya juga berkaitan dengan teori klasik Adam Smith tentang “the division of labor” (Bardhan, 2002). Teori itu menjelaskan bahwasanya keterampilan tenaga kerja merupakan salah satu bagian dalam upaya meningkatkan produktivitas (Bardhan, 2002).

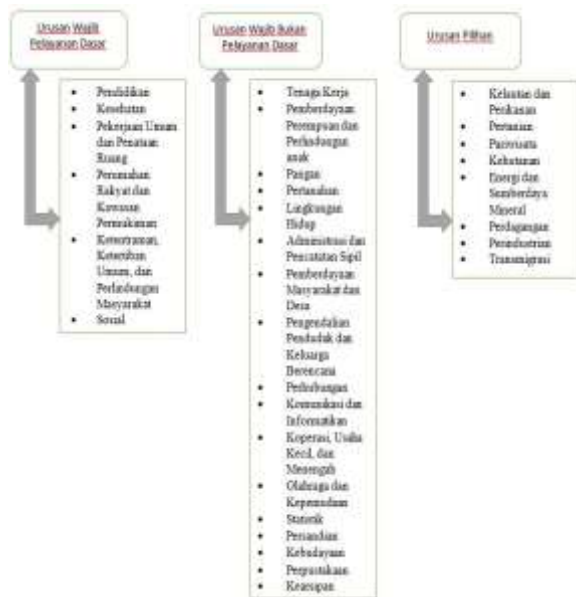
Hal pembeda dari UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU sebelumnya adalah menjelaskan secara tegas pembagian wewenang antara pemerintah daerah melalui konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsep-konsep tersebut didasarkan kepada pembagian urusan yaitu terdiri dari urusan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum (Nazaki, 2016). Pada urusan konkuren di dalamnya meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan wajib terbagi atas pelayanan dasar dan bukan pelayanan dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.

Sejatinya, pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang menjangkau seluruh kehidupan negara untuk memenuhi tugas mereka untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan yang menjalankan ekonomi serta memberikan keadilan sosial dengan cara material dan spiritual. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup manusia (A’ing, 2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang manajemen dan implementasi pendidikan dalam BAB II Pasal 3 (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan dimaksudkan untuk memastikan akses publik yang memadai, adil dan mudah diakses ke fasilitas pendidikan. , memastikan kualitas dan daya saing pendidikan dan relevansinya dengan kebutuhan. (Auldina, 2016). Sehingga perlu adanya jika pemerintah mendelegasikan urusan pendidikan kepada pemerintah daerah. Pada era otonomi daerah, desentralisasi pendidikan merupakan dampak dari keberadaannya (Aulia, 2012). Desentralisasi pendidikan adalah upaya untuk mentransfer administrasi pendidikan, yang pada awalnya terpusat menjadi pendidikan yang

menyesuaikan dengan kepentingan nasional atau sosial (Aulia, 2012).

**Gambar. 1**

**Urusan Konkuren Pemerintah Daerah**



**Sumber: UU 23 Tahun 2014**

Akan tetapi pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan nyata-nyata tidak memberikan efek yang besar terhadap pelayanan pendidikan masyarakat di perbatasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Auldina (2016) bahwa terdapat marginalisasi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat pesisir Laut Cina Selatan di Desa Mapur. Hal ini disebabkan posisi desa yang jauh dari ibu kota kecamatan Bintan Pesisir dan kota Kijang dan rendahnya jumlah penduduk dan siswa, menciptakan bentuk marginalisasi dalam bentuk fasilitas pendidikan yang tidak memadai.

Selanjutnya penulis beranggapan bahwasannya hal ini berlaku kepada daerah perbatasan di wilayah Kalimantan. Realitasnya bahwasannya pembangunan dipulau Kalimantan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi terkhusus di daerah perbatasan. Kebijakan desentralisasi secara ideal dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas dan efektivitas fungsi layanannya untuk semua lapisan masyarakat (Muhammad, 2016). Atas dasar pembahasan diatas penulis akan membahas terkait dengan dampak desentralisasi terhadap pelayanan pendidikan di Perbatasan Kalimantan.

Selanjutnya penelitian dari Rosliana et.al (2015) menyebutkan bahwasanya baik pemerintah pusat maupun daerah harus memetakan model inovasi yang terdapat di wilayah perbatasan Kalimantan. Penelitian ini merekomendasikan tiga model inovasi pendidikan, yaitu Sekolah Tapal Batas, Sekolah Filial, dan Sarjana Mengajar. Penelitian lainnya oleh A'ing (2015) menyebutkan bahwasanya pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dan Malaysia tepatnya Kecamatan Kayan Hulu belum terlaksana dengan maksimal. Kesejahteraan Guru belum terjamin, dan juga beberapa sekolah kekurangan tenaga pengajar serta sekolah-sekolah

masih kekurangan fasilitas. Selain itu bantuan pemberian oprasional sekolah dirasa kurang sejalan dengan bimbingan dan bekal pengelolaan yang baik sehingga belum cukup memenuhi kebutuhan di daerah perbatasan.

Selanjutnya (Neolaka, 2020) dalam bukunya berjudul “*Pendidikan Dasar di Daerah Perbatasan: Potret dan Upaya Peningkatan Kualitasnya*” menyebutkan bahwasanya urgensi pendidikan dalam perspektif kebijakan tertuang dalam Education for All (EFA) yang di deklarasikan dalam konferensi internasional tentang pendidikan di Jomiten Thailand pada tahun 1990. Secara garis besar menjelaskan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan sebagai hak asasi manusia merupakan ukuran keadilan pemerataan hasil pembangunan serta merupakan sebuah jalan investasi bangsa dalam pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini menandakan bahwasanya ketika pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan pendidikan tidak terdistribusi dengan baik, maka negara telah gagal memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya.

Alasan penting mengapa isu ini harus dikaji adalah agar adanya kebaruan fenomena dan hasil penelitian bahwa dampak dari desentralisasi dapat dirasakan oleh semua lini kehidupan, termasuk pendidikan. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar serta memiliki perbatasan darat dengan

Malaysia, oleh sebab itu sangat menjadi kajian menarik untuk melihat bagaimana dampak desentralisasi pendidikan di kawasan perbatasan yang notabene jauh dari pusat kota. Desentralisasi hadir menawarkan sebuah sistem baru yang lebih merakyat, desentralisasi juga menjanjikan urusan kewenangan yang dilimpahkan dari pusat kepada daerah. Hal ini menjadikan daerah perbatasan, terutama Kalimantan menjadi lokasi rawan untuk dilihat bagaimana perkembangannya. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kalimantan?”. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak desentralisasi terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan di perbatasan Kalimantan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data secara pustaka, seperti membaca, kemudian mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Studi kepustakaan merupakan tуди yang

digunakan untuk mengumpulkan informasi serta data dengan berbagai macam material pustaka, seperti dokumen, makalah, buku, majalah, penelitian terdahulu, serta lainnya (Mirzaqon & Purwoko, 2015).

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong metode kualitatif meliputi observasi dokumen, wawancara, atau studi kepustakaan (Yulindaningtyas, 2015). Karena sejumlah alasan, metode kualitatif ini digunakan. Pertama, ketika berhadapan dengan realitas majemuk, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah. Kedua, metode ini secara langsung menyuguhkan sifat hubungan peneliti-responden. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan banyak efek penajaman pengaruh timbal balik pada pola nilai yang telah ditemukan.

### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juni 2020. Lokasi penelitian ini terletak pada dua kabupaten di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Malinau Kalimantan Utara dan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Selanjutnya penulis mengambil fokus kepada masing-masing kecamatan yang berhadapan langsung dengan

Serawak Malaysia, yaitu Kecamatan Kayan Ulu dan Kecamatan Entikong.

### **Target/Subjek Penelitian**

Target/subjek penelitian ini yakni dengan melihat dan menganalisis data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik, selanjutnya penulis melakukan penelusuran dan telaah yang mendalam dengan didukung oleh informasi pendukung yang terangkum dalam berita/media massa maupun wawancara.

### **Prosedur**

Prosedur dalam penelitian ini ialah dengan memanfaatkan studi kepustakaan dan analisis data melalui BPS. Data yang ada dilihat dan dianalisis berdasarkan indikatornya masing-masing. Peneliti menganalisis dengan melihat fenomena yang ada dan dengan kejadian yang seharusnya. Sehingga hasil akhirnya peneliti dapat memberikan sat ugaris besar apakah desentralisasi sudah terealisasi dengan baik, terutama di daerah perbatasan Kalimantan.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, diantaranya ialah primer dan sekunder. Data primer artinya data yang diperoleh secara langsung. Sedangkan sekunder adalah data tidak langsung seperti

bersumber dari arsip maupun dokumen-dokumen lain yang dianggap penting. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan

### HASIL DAN PEMBAHASAN

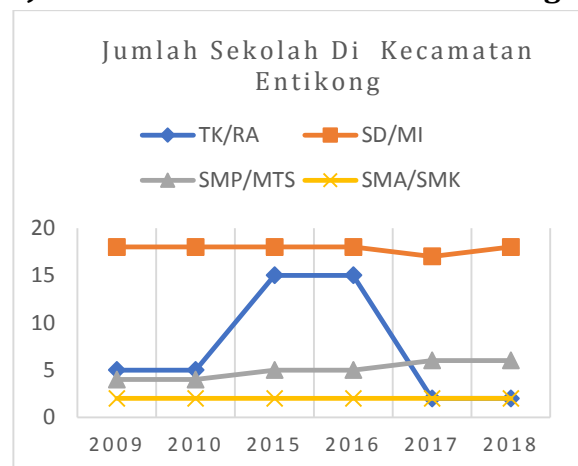
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Salah satu program yang menjadi perwujudan daripada regulasi tersebut adalah dengan pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun (Yosada, 2016). Bahkan di beberapa daerah mempunyai kebijakan pendidikan hingga 12 tahun. Kebijakan desentralisasi memiliki tujuan mulia yakni agar pemerintah pusat dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Muhammad, 2016). Penulis berpendapat bahwasannya ketika kebijakan desentralisasi dilaksanakan maka pelayanan yang

diberikan oleh pemerintah seharusnya lebih maksimal.

Akan tetapi kebijakan wajib belajar tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal apabila fasilitas penunjang pembelajaran tidak mendukung. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa salah satu kendala dalam mewujudkan desentralisasi yang baik ialah sarana dan prasarana di Pemerintah Daerah yang belum memadai (Maisyanah, 2018). Seperti data yang penulis himpun dari tahun 2009-2018 baik Kecamatan Entikong maupun Kecamatan Kayan Hulu, pembangunan fasilitas sekolah belum meningkat secara signifikan. Bahkan beberapa ada yang mengalami penurunan jumlah sekolah, seperti yang tersaji pada gambar 2 di bawah ini.

**Gambar.2**

### Jumlah Fasilitas Sekolah di Entikong



**(Sumber: BPS Kabupaten Sanggau 2010-2018)**

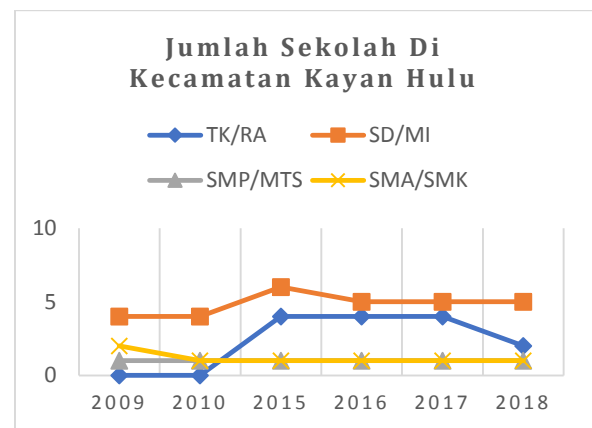
Gambar 2 di atas memperlihatkan grafik pembangunan fasilitas sekolah di

Kecamatan Entikong. Data tersebut dapat dikatakan cenderung stagnan untuk SMA/SMK, SMP/MTS dan SD/MI serta selanjutnya untuk TK/RA memiliki peningkatan yang cukup signifikan namun selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan pula. Hal yang menarik terdapat pada tingkatan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang mengalami kenaikan serta penurunan dalam kurun waktu 2009-2018. Pada tahun 2009 terdapat 5 unit sekolah TK dan meningkat pada menjadi 15 unit pada tahun 2015, namun turun drastis pada tahun 2017 hanya tersisa menjadi 2 unit saja. Pada tingkatan pendidikan lainnya hampir tidak mengalami kenaikan yang sangat berarti, hanya pada tingkatan SMP yang mengalami penambahan fasilitas sekolah yaitu pada kurun waktu 2009 hingga 2018 mengalami kenaikan 2 unit SMP.

Pada tingkatan SD sempat mengalami pengurangan fasilitas sekolah dasar pada tahun 2017 namun kembali pada tahun 2018. Sedangkan untuk tingkat SMA stagnan dalam hal ini tidak ada penambahan unit dalam kurun waktu 2009-2018. Seharusnya, pembangunan fisik dapat dilakukan secara maksimal guna mendukung desentralisasi pendidikan. Padahal tujuan lembaga pendidikan seyogyanya mampu mendukung usaha pembangunan daerah setempat (Setyaningsih, 2017). Hal ini

dikarenakan, segala akses baik sarana dan prasarana dapat saling menunjang satu sama lain untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam ranah desentralisasi. Data selanjutnya dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.

**Gambar. 3**  
**Jumlah Fasilitas Sekolah di Kayan Hulu**



(Sumber: BPS Kabupaten Malinau (2010-2019))

Pendidikan ialah bagian tak terpisahkan dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti halnya kesejahteraan ekonomi dan kesehatan (Fatkhuri, 2019). Pembangunan sekolah masuk dalam ranah kebutuhan rakyat karena masuk dalam fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Pada gambar 3 menjelaskan bagaimana pembangunan fasilitas sekolah di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Kayan Hulu tidak lebih baik dibandingkan dengan di Kecamatan



Entikong. Grafik yang terlihat cenderung mengalami penurunan setelah terjadinya peningkatan. Hal ini memvisualisasikan terjadinya ketidak stabilan pembangunan fasilitas sekolah di Kecamatan Kayan Hulu. Pembangunan TK/RA pada tahun 2010-2015 mengalami kenaikan sebanyak empat unit, selanjutnya stagnan sampai tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan hingga 2 unit. Pembangunan fasilitas SD di Kecamatan Kayan Hulu kurun waktu tahun 2009-2015 mengalami kenaikan jumlah, yang semula hanya empat unit naik menjadi enam unit. Akan tetapi angka tersebut turun pada tahun 2016 menjadi lima unit hingga tahun 2018. Selanjutnya untuk tingkat SMP/MTS memiliki angka yang stagnan pada unit satu dari tahun 2009-2018. Terakhir yakni tingkat SMA/SMK, pembangunan pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebanyak satu unit, selanjutnya stagnan pada angka satu unit hingga tahun 2018.

Periode 2009-2018 merupakan dua kurun waktu berbeda dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Sebelum tahun 2014 kebijakan desentralisasi diatur dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sedangkan pasca 2014 kebijakan tersebut berubah menjadi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut menempatkan urusan pendidikan sebagai pelayanan dasar.

Artinya pendidikan sebagai salah satu hak mutlak bagi setiap masyarakat di Indonesia. Pendidikan juga diakui dapat memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa (Buto & Hafifuddin, 2019), termasuk di daerah perbatasan. Namun hingga tahun 2019 realita yang terjadi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, menurut BPS Kabupaten Sanggau (2019) menyampaikan dalam laporan Entikong dalam Angka tahun 2019 terdapat 28 bangunan sekolah yang terdapat di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan**  
**Kecamatan Entikong**

Tingkatan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio guru dan Murid
TK	2	57	2	25,5
SD	18	2185	95	22,80
SMP	6	882	61	14,45
SMA	2	412	40	10,30

**Sumber : BPS Kabupaten Sanggau (2019)**

Pada tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwasanya untuk tingkat pendidikan SD terdapat 18 sekolah dengan jumlah 2185 murid serta jumlah guru 95 orang. Tingkatan SMP terdapat 6 sekolah dengan 882 murid dan 61 orang guru. Tingkatan SMA hanya memiliki 2 sekolah dan jumlahnya hanya 412 murid, dengan 40 orang guru. Rasio guru dan murid untuk SD sebesar 1:22,8, tingkatan SMP

sebesar 1:14,45, dan untuk tingkatan SMA sebesar 1:10,30. Pada tingkatan SMA, fasilitas yang tersedia hanya sekolah kejuruan saja, satu berstatus negeri dan satu lagi swasta. Selain itu beberapa sekolah dasar letaknya berada di dusun yang lokasinya jauh daripada ibu kota kecamatan. Selain lokasinya yang berjauhan dengan ibu kota kecamatan, beberapa sekolah dasar pun masih menggunakan jasa para personel TNI untuk melakukan aktivitas pembelajaran dikarenakan masih minimnya tenaga pengajar. Sejatinya, terdapat berbagai bidang yang menjadi kewenangan dalam desentralisasi pendidikan di daerah, salah satunya yakni bidang pengembangan Sumberdaya Manusia (Hafifuddin, 2017). Seharusnya, pemerintah dapat lebih memfokuskan bagaimana kualitas tenaga pengajar, terlebih pada wilayah perbatasan. Karena wilayah perbatasan ialah aset bangsa yang berharga.

Tidak berbeda kondisi Kecamatan Entikong dengan Kecamatan Kayan Hulu, justru lebih memprihatinkan. Kecamatan Kayan Hulu yang berbatasan langsung dengan Serawak ini hanya memiliki tujuh bangunan sekolah mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Fasilitas tersebut terdiri dari lima sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama dan satu lagi merupakan sekolah menengah atas. Fasilitas sekolah dasar terdapat di semua desa, namun ada beberapa sekolah dasar

yang hanya bisa melayani hingga kelas tiga saja (BPS Kabupaten Malinau, 2018) dan setelah itu harus meneruskan ke sekolah dasar yang berada di ibukota kecamatan.

Selain itu terdapat 72 guru di kecamatan Kayan Hulu, 14 di antaranya adalah guru kontrak Kabupaten. Sekolah yang memiliki banyak guru kontrak adalah SMP dan SMA, yaitu masing-masing 5 orang, sementara hanya ada 4 orang untuk sekolah dasar dan tidak ada guru kontrak untuk guru TK tetapi hanya guru honorer. Guru kontrak ini memiliki masa kontrak kerja 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis, tetapi guru yang akan diperpanjang hanya guru yang terlibat dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah. Selain karyawan kontrak terpadat guru yang berstatus sebagai guru honor. Distrik Kayan Hulu memiliki guru honor sebanyak 32 orang dari total keseluruhan 72 guru (BPS Kabupaten Malinau, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah perbatasan masih menggunakan banyak guru honorer untuk membantu proses belajar mengajar dan menjalankan administrasi sekolah.

Pendidikan merupakan hal terpenting dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa ke depan. Perubahan yang diharapkan dari sektor pendidikan tentu saja yang berkaitan dengan perubahan sikap, perilaku, mental, serta pola pikir (Badaruddin,

2017). Salah satu hal yang paling berpengaruh dalam mewujudkan perubahan tersebut ialah tenaga pendidik/guru. Pendidik juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan belajar di sekolah karena guru sangat berperan dalam membantu pengembangan siswa untuk mewujudkan tujuan hidup mereka secara optimal. Guru dalam proses belajar mengajar, memiliki peran yang sangat penting yaitu menggali minat, bakat dan kemampuan masing-masing siswa yang diajarkan di kelas. Pendidikan pada dasarnya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas guna memberikan kesempatan seluas mungkin bagi warga untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Karena melalui pendidikan akan memperluas pengetahuan masyarakat dan meningkatkan rasionalitas.

Pendidik memiliki dampak yang luar biasa pada kualitas pembelajaran di sekolah karena guru sangat berpengaruh dalam membantu pertumbuhan siswa untuk mencapai tujuan hidup mereka secara optimal. Guru dalam proses belajar mengajar, memiliki peran yang sangat penting yaitu menggali minat, bakat dan kemampuan masing-masing siswa yang diajarkan di kelas. Selain itu, guru juga memiliki tanggung untuk melatih siswa menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan mandiri (Badaruddin, 2017). Pendidikan

seharusnya mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan produksi sumber daya manusia dalam upaya memberikan peluang seluas mungkin bagi warga negara untuk mengambil bagian aktif dalam proses pertumbuhan. Karena itu akan memperluas pengetahuan masyarakat dan meningkatkan rasionalitas melalui pendidikan.

Selain faktor kualitas sumber daya manusia, faktor pembangunan fisik juga memiliki dampak. Untuk fasilitas sekolah menengah pertama dan atas hanya tersedia di ibu kota kecamatan saja. Selain Fasilitas sekolah yang minim, fasilitas tenaga pengajarpun masih minim sekali. Hanya ada 38 guru yang terbagi ke tiap-tiap sekolah dasar yang ada di desa, 14 tenaga pengajar untuk menengah pertama dan 20 tenaga pengajar untuk tingkatan menengah atas. Rasio guru dan murid di kecamatan Kayan Hulu untuk sekolah dasar 1:8,58, untuk menengah pertama 1:13,64, dan untuk menengah atas 1:7,3 (BPS Kabupaten Malinau, 2018). Hal tersebut dapat diperkuat dengan data yang tersaji pada tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan**  
**Kecamatan Kayan Hulu**

Tingkatan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio guru dan Murid
TK	2	57	2	25,5
SD	5	326	38	8,58

---

SMP	1	191	13	13,64
SMA	1	146	20	7,30

---

Sumber : (Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Malinau, 2019)

Terdapat hal menarik dalam data di atas, rasio guru dan murid di dua kecamatan tersebut terhitung tidak begitu baik. Studi yang dilakukan oleh UNESCO menunjukkan secara internasional, rata-rata di seluruh dunia rasionya 1:27,7 atau seorang guru dengan 27-28 siswa (Jailani, 2009). Jika dilihat pada data di atas, dari kedua kecamatan tersebut tidak ada yang mencapai rasio 1:27,7. Hal ini berbanding terbalik dengan realita, diberbagai sekolah yang berlokasi jauh dari ibu kota kecamatan masih menggunakan TNI sebagai tenaga pengajar. Ketersediaan guru dalam proses belajar mengajar adalah sesuatu yang sangat penting karena guru sebagai instruktur yang memberikan materi pelajaran kepada siswa dan membimbing siswa dalam memahami pelajaran bertindak sebagai motivator bagi siswa di kelas dalam proses belajar mengajar.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa adanya ketidaksinkronan apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana yang seharusnya. Seharusnya, pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memahami pesan-pesan konstitusi serta sebagai wahana dalam membangun watak bangsa (Nation Character

Building) (Buto & Hafifuddin, 2019). Namun, hal ini masih susah untuk di atasi karena banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak semua pendidik mampu dan siap untuk menjalankan tugasnya untuk mendidik, terlebih pada kawasan perbatasan. Itu sebabnya, TNI juga turut berkontribusi menjalankan misi pendidikan meski itu bukan merupakan tugas dan fungsinya secara nyata. Semua dilakukan hanya sukarela. Kawasan perbatasan selalu menghadirkan fenomena yang tak terbayangkan sebelumnya. Kekurangan tenaga pendidik dapat diatasi dengan melakukan peran fungsi ganda. Seperti TNI yang merangkap menjadi tenaga pendidik, dan tentu masih banyak fenomena lain yang terjadi.

Sudut pandang yang penulis berikan terhadap fenomena ini karena hal ini salah satunya dipengaruhi oleh motivasi belajar oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Huruswati et.al (2012) berpendapat bahwasanya motivasi menempuh pendidikan anak perbatasan terlepas dari keinginan dan kapasitas orang tua dan masyarakat untuk membuat pendidikan menjadi relevan. Antusiasme kebanyakan orang terhadap nilai pendidikan anak-anak masih sangat meresahkan, sehingga anak-anak lebih suka dinasihati untuk meninggalkan sekolah setelah menyelesaikan sekolah dasar dan sebagai gantinya mendukung orang tua

untuk berfungsi. Hal ini dapat terlihat dalam tabel 1 dan 2, bahwa baik di kecamatan Entikong maupun kecamatan Kayan Hulu setiap kenaikan tingkatan pendidikan, semakin kecil jumlah murid yang bersekolah.

Di antara faktor-faktor ekonomi, salah satu hambatan untuk menumbuhkan pengetahuan dan standar pendidikan yang mapan di perbatasan adalah jarak antara sekolah dari tempat siswa tinggal. Masyarakat Kayan Hulu untuk melanjutkan pendidikan setelah dari sekolah dasar harus pergi ke ibukota kecamatan untuk mendapatkan fasilitasnya. Hal ini disebabkan fasilitas pendidikan menengah hanya tersedia di ibukota kecamatan. Masyarakat Entikong juga merasakan hal yang serupa, untuk melanjutkan mereka harus pergi ke ibukota kecamatan atau desa tetangga dengan jarak yang cukup jauh. Seperti contoh desa Suruh Tembawang berjarak 42 KM dari ibukota kecamatan Entikong. Atau jika ingin menggunakan transportasi yang tersedia, masyarakat harus mengeluarkan biaya Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000 untuk menggunakan transportasi air sekali jalan (Yosada, 2016).

Pemerataan tenaga pengajar menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan di daerah perbatasan terhambat. A'ing (2015) berpendapat bahwa tenaga pengajar di daerah perbatasan khususnya Kayan Hulu lebih

banyak berada di ibukota kecamatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesejahteraan tenaga pengajar. Regulasi rekrutmen pegawai negeri sipil hari ini yang dilaksanakan secara terpusat juga menjadi salah satu faktor penghambat. Terhalang regulasi tersebut, pemerintah daerah Malinau hanya mampu untuk mengadakan tenaga guru kontrak. Sama halnya dengan kecamatan Entikong yang masih sangat bergantung kepada guru kontrak. Status guru kontrakpun hanya sebagai guru kontrak komite, dengan gaji hanya berkisar Rp. 100.000 – Rp. 400.000 saja (Yosada, 2016).

Tidak dipungkiri bahwasanya harga bahan pokok di daerah perbatasan sangat mahal, hal ini dikarenakan akses yang sangat susah menuju daerah tersebut (A'ing, 2015; Yosada, 2016). Ketimpangan antara pendapatan dengan biaya hidup menjadikan sering sekali guru-guru tersebut lebih memilih untuk berkerja di Serawak Malaysia (Yosada, 2016).

Melihat fenomena tersebut, pada dasarnya pelaksanaan desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan. Nampaknya semangat desentralisasi untuk memasimalkan kontrol terhadap pelayanan publik, mencapai pemerataan pelayanan keseluruhan penjuru negeri, kesejahteraan rakyat yang demokratis (Rauf Alauddin Said, 2015), tidak berlaku

untuk masyarakat di daerah perbatasan. Akses pendidikan yang menjadi hak masyarakat perbatasan, tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Seharusnya dengan kebijakan desentralisasi, pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Muhammad, 2016).

Desentralisasi secara teoritis harusnya dapat menghilangkan kesenjangan sosial antara pembuat kebijakan dan orang-orang yang merasakan dampak kebijakan tersebut (Syauqi, 2016). Hal tersebut mengisyaratkan desentralisasi idealnya akan mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata, termasuk di dalamnya adalah pemerataan pendidikan. Selain itu Edward B. Fiske, mengatakan bahwa *Decentralization is necessary but not sufficient to improve the quality of education*. Desentralisasi pendidikan sebenarnya akan mempercepat perkembangan perasaan nasional yang lebih aman dan lebih konkret karena difokuskan pada modal budaya atau pengalaman pendidikan lokal (Supriyadi, 2009). Tetapi yang dialami oleh daerah perbatasan Kalimantan nyatanya berbanding terbalik dengan dampak yang seharusnya terjadi dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan. Perasaan nasional yang dimaksud oleh kedua konsep desentralisasi di atas tidak

berlaku pada kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, melihat kebijakan-kebijakan pendidikan terkesan sentralistik dan cenderung mengeneralisir kondisi yang terjadi di lapangan layaknya kondisi yang ada di perkotaan. Nilai-nilai budaya serta praksis pendidikan di tingkat lokal tidak menjadi point pertimbangan ketika menetapkan kebijakan-kebijakan pendidikan, dengan kata lain desentralisasi pendidikan hari ini terkesan setengah-setengah.

Selain itu teori pertumbuhan baru juga menekankan peran penting pemerintah, terutama dalam meningkatkan produksi *human capital* (sumber daya manusia) dan mempromosikan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi di bidang pendidikan, fakta dapat dilihat akan dapat meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dilihat dari pengetahuan dan kemampuan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman juga akan meningkat untuk mempromosikan peningkatan efisiensi pekerjaan (Mufizar et.al, 2012). Jika merujuk dalam sejarah global, pembangunan *human capital* biasanya menjadi hal pokok yang dilakukan oleh negara-negara maju. Seperti contoh Jepang pasca Perang Dunia II, setelah Kota Hiroshima dan Nagasaki

dihancurkan oleh Amerika Serikat hal yang pertama dilakukan oleh Pemerintah Jepang adalah menghimpun dan menyelamatkan para tenaga pengajar dan ahli yang selamat dalam tragedi tersebut (Acemoglu & Robinson, 2012). Hal tersebut bertujuan untuk prioritas persiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam rangka menuju kebangkitan negara. Seharusnya lewat kebijakan desentralisasi pemerintah daerah harusnya lebih memperhatikan sumber daya manusia yang ada di daerah perbatasan

Dampak lain dari tidak terlaksana dengan baiknya desentralisasi urusan pendidikan di wilayah perbatasan adalah terjadinya *human trafficking* terhadap anak-anak perbatasan. Data dari salah satu LSM di Entikong, LSM Anak Bangsa, KPAI mendapatkan data pada tahun 2010 menangani lebih dari 200 korban *trafficking* yang 90 persen lebih adalah anak-anak (Wismayanti, 2012). Selain masalah *human trafficking*, Dampak daripada buruknya pelayanan pendidikan di perbatasan adalah banyaknya masyarakat yang memilih untuk Eksodus dari Indonesia. Salah satu tujuannya adalah agar dapat menyekolahkan anaknya ke Malaysia (Yosada, 2016). Dengan adanya fasilitas pendidikan yang mumpuni, SDM (guru) yang berkualitas, bebas biaya pendidikan, sekolah dilengkapi dengan asrama, seragam dan buku-buku penunjang hingga jaminan

kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi. Hal ini tentu menjadi daya Tarik tersendiri bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan layak. Bagi yang tetap memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, mereka lebih memilih untuk menempuh jarak yang jauh untuk sekolah ke Malaysia, dibandingkan harus berjalan jauh bersekolah di sekolah Indonesia yang notabene kualitasnya masih sangat jauh. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap rasa nasionalisme dari anak-anak tersebut, karena sendiri ini mereka lebih merasa diperhatikan oleh pemerintah Malaysia dibandingkan pemerintah negaranya sendiri. Lainnya lagi yang seharusnya mereka setiap hari senin upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia raya, namun mereka justru lebih hafal lagu kebangsaan Malaysia dibandingkan negaranya sendiri. Namun semua itu tergantung daripada upaya pemerintah untuk membangun daerah perbatasan karena pada dasarnya upaya desentralisasi pendidikan gagal atau berhasilnya tergantung oleh alasan-alasan politis dari pada rancangan teknis (Supriyadi, 2009).

Sekolah adalah lembaga sosial yang keberadaannya membentuk bagian dari sistem sosial bangsa, dengan tujuan menghasilkan orang yang mampu, demokratis, bertanggung jawab, setia, setia, saleh, sehat secara fisik dan mental

dengan pengetahuan dan kemampuan. Untuk mengoordinasikan pembelajaran seorang guru, tentunya dibutuhkan sarana yang dapat membantu keberhasilannya, sehingga semua pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Seperti halnya daerah perbatasan, sarana dan prasarana sekolah sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah perbatasan. Selain itu beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar, yaitu perpustakaan, fasilitas untuk mendukung kegiatan kurikulum, dan fasilitas untuk membangun sekolah, dan tempat tinggal resmi para guru. Siswa dan guru akan terlibat langsung, mengingat pentingnya fasilitas dan infrastruktur dalam kegiatan belajar. Siswa akan lebih terbantu dengan mendukung fasilitas dan infrastruktur pembelajaran, dan dukungan dari fasilitas pendidikan akan membantu para guru. Desentralisasi yang diberikan kepada daerah seharusnya memberikan pencerahan bagi daerah (Hafifuddin, 2017) khususnya pada wilayah perbatasan.

Pada dasarnya wilayah perbatasan adalah area terpenting di halaman depan negara Indonesia, dan itulah sebabnya pemerintah harus memberi perhatian khusus (Auldina, 2016). Perbatasan sebagai teras depan Negara tampaknya menjadi penghalang dalam melindungi

kedaulatan bangsa dan sekaligus gudang keterbelakangan dalam pertumbuhan nasional, termasuk pendidikan. Idealnya, pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan material dan spiritual secara merata pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta yang menjalankan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial (A'ing, 2015), namun nampaknya tidak berlaku di daerah perbatasan. Pengembangan wilayah perbatasan melalui pendidikan sangat penting karena sumber daya manusia masih sangat rendah di wilayah perbatasan, sehingga pemerintah terus mengembangkan pendidikan perbatasan untuk menciptakan masyarakat perbatasan yang maju dalam menghadapi pembangunan dan menjadi masyarakat yang mandiri.

Dari seluruh penjabaran yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditarik sebuah garis lurus bahwasanya dampak desentralisasi pendidikan di wilayah perbatasan Kalimantan masih mengalami ketertinggalan atau dapat dikatakan negatif. Hal ini linier dengan jumlah pembangunan fisik maupun potensi sumber daya manusia yang masih belum maksimal untuk mengajar di wilayah perbatasan, bahkan lebih miris lagi ketika TNI juga turut andil ambil bagian untuk mengajar padahal sejatinya bukan tugas pokok dan fungsinya sebagai tombak kekuatan



bangsa yang menjaga keutuhan Negara. Namun hal inilah yang dinamakan fenomena, beberapa hal yang terjadi pada wilayah perbatasan banyak mengundang perhatian karena masih jauh dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mumpuni. Dalam desentralisasi pendidikan, sejatinya lembaga pendidikan bukan dijadikan sebagai obyek dari sistem namun sebagai subyek (Setyaningsih, 2017). Kendati demikian, sasaran akhir dari desentralisasi pendidikan ialah masyarakat yakni yang berkaitan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke – IV.

Penerapan desentralisasi pendidikan secara tuntas dan transparan ialah merupakan sebuah keharusan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidikan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab (Badaruddin, 2017). Namun hal ini tentu harus sejalan dengan semangat perbaikan dan pembaharuan, terutama di wilayah perbatasan. Meski dampak negatif yang cenderung lebih kentara, namun inilah saatnya untuk mengevaluasi bagaimana wajah pendidikan demokrasi hari ini. Tentu hal ini menjadi kerja bersama antara masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi memberikan semangat baru untuk melakukan inovasi dan memanfaatkan

potensi lokal secara maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan (Junaidi, 2020)

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan desentralisasi secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan. Artinya, dampak yang dihasilkan masih cenderung negatif dengan melihat berbagai fenomena yang terjadi di lapangan baik pembangunann fisik maupun non fisik. Hal ini didasari kepada pembangunan fasilitas sekolah dalam kurun waktu 2009 hingga 2018 tidak ada kenaikan yang signifikan, bahkan hingga pada tahun 2019. Selain itu fasilitas pendidikan seperti tenaga pengajar serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah masih sangat memperhatikan. Beberapa sekolah dasar masih menggunakan jasa para personel TNI untuk membantu sebagai tenaga pengajar di daerah perbatasan. Fasilitas pendidikan yang masih terpusat di kecamatan juga menjadi permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan. Hal selanjutnya adalah kesejahteraan para tenaga pengajar yang masih kurang diperhatikan. Sistem rekrutmen PNS yang terpusat menjadikan kendala tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemenuhan tenaga

pengajar di wilayah perbatasan. Selama ini baik dari Pemerintah Sanggau ataupun Pemerintah Malinau masih mengandalkan guru kontrak untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah perbatasan.

### Saran

Desentralisasi nyatanya belum mampu untuk memaksimalkan kontrol terhadap pelayanan publik, mencapai pemerataan pelayanan keseluruhan penjuru negeri, kesejahteraan rakyat yang demokratis. Ketimpangan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan juga berimbas kepada aspek lainnya. Pertama, jauhnya fasilitas pendidikan serta rendahnya motivasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan menjadi faktor pendukung terjadinya *human trafficking* terhadap anak-anak usia sekolah di perbatasan. Selanjutnya banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih untuk Eksodus agar anaknya dapat mendapat fasilitas pendidikan yang layak di Malaysia. Selanjutnya sebagaimana masyarakat memilih untuk menyekolahkan anaknya di Malaysia dengan tidak melakukan eksodus. Akan tetapi hal ini akan berpengaruh terhadap nasionalisme anak-anak tersebut, karena merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah Malaysia dibandingkan pemerintah Indonesia.

Rekomendasi implikatif untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di kawasan berbeda dengan mengambil objek yang sama, yakni kawasan perbatasan. Desentralisasi yang terjadi di Kalimantan bisa jadi jauh berbeda dengan yang ada di daerah lain. Studi

komparasi juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti ke depannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- A'ing, A. (2015). Studi Tentang Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. *Pemerintahan Integratif*, 3(4), 545–559. Retrieved from <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/33>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: the origins of power, prosperity, and poverty* (1st Editio). New York: Crown Publishers.
- Auldina, L. (2016). *Marginalisasi Pendidikan Di Daerah Perbatasan ( Studi Kasus Di Desa Mapur Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau )*. 1–20.
- Aulia, S. (2012). Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 204–216.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2010). *Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2010*. Retrieved from <https://malinaukab.bps.go.id/publi>

- ation/2010/12/06/7874cca9f1c13f1f91393799/kabupaten-malinau-dalam-angka-tahun-2010.html
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2011). *Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2011*. Retrieved from <https://malinukab.bps.go.id/publication/2011/08/15/df21da3b3f169a59f1835b34/kabupaten-malinau-dalam-angka-tahun-2011.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2015). *Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2015*. Retrieved from <https://malinukab.bps.go.id/publication/2015/11/02/fb395101bc56777285f94846/kabupaten-malinau-dalam-angka-2015.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2016). *Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2016*. Retrieved from <https://malinukab.bps.go.id/publication/2016/07/15/79ecf4279034c4b5e2f9532d/kabupaten-malinau-dalam-angka-2016.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2017). *Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2017*. Retrieved from <https://malinukab.bps.go.id/publication/2017/08/11/f45f05e45a16d8e7d7ebc95a/kabupaten-malinau-dalam-angka-2017.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2018). *Kabupaten Malinau dalam Angka Tahun 2018* (p. 366). p. 366. Retrieved from <https://malinukab.bps.go.id/publication/2018/08/16/c8ea3f18a363ed6787541616/kabupaten-malinau-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. (2019). *Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2019*. Retrieved from <https://malinukab.bps.go.id/publication/2019/08/16/0e15c2bc87f7443b736145ad/kabupaten-malinau-dalam-angka-2019>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2010). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2010*. Retrieved from <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2011/11/07/8784784f935d5214edd5e594/kecamatan-entikong-dalam-angka-2010.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2011). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2011*. Retrieved from <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2012/02/16/8365904300ecfbef1de2f266/kecamatan-entikong-dalam-angka-2011.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2015). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2015*. Retrieved from

- <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2015/12/23/795f29d093a73a6c270a8dd0/kecamatan-entikong-dalam-angka-tahun-2015.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2016). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2016*. Retrieved from <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2016/07/29/553d12af476f20433567808c/kecamatan-entikong-dalam-angka-2016.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2017). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2017*. Retrieved from <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2017/09/26/e1d330ec15b3af2033ae62ef/kecamatan-entikong-dalam-angka-2017.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2018). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2018* (p. 155). p. 155. Retrieved from <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2018/09/26/7d8177f1fcd754b999a0277e/kecamatan-entikong-dalam-angka-2018.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2019). *Kecamatan Entikong dalam Angka Tahun 2019* (p. 498). p. 498. Retrieved from <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/2019/09/26/4f6ed7d890780ecda1094b05/kecamatan-entikong-dalam-angka-2019.html>
- Badaruddin, N. (2017). Problematika Pendidikan Modern. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 19–32.
- Buto, A. Z., & Hafifuddin. (2019). Perkembangan Desentralisasi Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Sdm Dan Pendidikan Islam Di Wilayah Kota Lhokseumawe. *Perkembangan Desentralisasi Pendidikan Islam ITQAN*, 10(2), 13–28.
- Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 278–297. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.874>
- Hafifuddin. (2017). DISENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LHOKSEUMAWE. *Problematika Guru Dalam Media*, 8(2), 169–186.
- Jailani, M. S. (2009). Guru Profesional dan Tantangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'lim*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/10.15548/jt.v21i1.66>
- Junaidi. (2020). Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru. *Kuttab*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.30736/ktb.v4i1.104>
- Maisyannah, M. (2018). Analisis Dampak

- Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management. *Quality*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.21043/quality.v6i2.5773>
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2015). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing*. 1–8.
- Mufizar, Arkanudin, & Achyar, M. S. (2012). Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal PMIS-UNTAN-PSS*, 1(1), 1–22.
- Muhammad, A. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 105/107. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2800>
- Nazaki. (2016). KEPUASAAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT DI DAERAH. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 121–160.
- Neolaka, M. N. B. C. (2020). *Pendidikan Dasar di Daerah Perbatasan: Potret dan Upaya Peningkatan Kualitasnya*. Intelgensia Media.
- Rauf Alauddin Said, A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. Retrieved from <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>
- Roslina, L., W, F. H., Lutfie, W., Kemal Hidayah, & Aziza, T. N. (2015). Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan Di Perbatasan Kalimantan Utara (Border Management Focus Innovation Education in North Kalimantan Border). *Jurnal Borneo Administrator*, 11(3), 316–339. <https://doi.org/10.24258/jba.v11i3.205>
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76–94.
- Supriyadi. (2016). Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka*, 2(2), 83–93.
- Supriyadi, U. D. (2009). PENGARUH DESENTRALISASI PENDIDIKAN DASAR TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 35–58.
- Syauqi. (2016). THE IMPLICATIONS OF

THE ACT NUMBER 23 OF 2014 OF THE REPUBLIC. *Sosio Informa Vol.*, 2(1), 19–32.

- Wismayanti, Y. F. (2012). PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS KOMUNITAS DI WILAYAH PERBATASAN; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. *Sosio Konsepsia, Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 17(01), 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v17i1.811>
- Yosada, K. (2016). Pendidikan Di Beranda Terdepan Negara Perbatasan Entikong. *Prosiding Seminar Nasional FE UNY*, 192–201. Retrieved from <http://eprints.uny.ac.id/41250/>
- Yulindaningtyas, D. (2015). *KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT*. 4(2), 418–425.

**Profile Penulis :**

Iman Surya, lahir di Balikpapan pada 12 Desember 1974. Penulis menempuh jenjang pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Mulawarman, kemudian melanjutkan pendidikan S2 jurusan Administrasi Publik di Universitas Mulawarman dan melanjutkan pada program S3 jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas

Hasanuddin. Saat ini, aktivitas yang dilakukan ialah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (mengajar, meneliti, menulis dan melakukan pengabdian kepada masyarakat) serta beberapa kesibukan lain seperti menjadi tenaga ahli.

Budiman, lahir di Ongkoe pada 12 Juli 1977. Penulis menempuh jenjang pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin, dan melanjutkan pendidikan S2 jurusan Administrasi Pembangunan di Universitas Hasanuddin. Saat ini, aktivitas yang dilakukan ialah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (mengajar, meneliti, menulis dan melakukan pengabdian kepada masyarakat).

Tengku Imam Syarifuddin, lahir di Loa Duri pada 11 April 1998. Penulis menempuh jenjang pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Mulawarman lulus pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, kesibukan/aktivitas yang dilakukan ialah mengajar, meneliti, menulis dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.



**JURNAL AGREGASI**  
**Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam**  
**Demokrasi**  
**Volume 9–Nomor 1, Mei 2021**



DOI: [10.34010/agregasi.v9i1.4121](https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4121)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

---

Niken Nurmiyati, lahir di Sumatera Utara pada 10 Januari 1996. Penulis menempuh jenjang pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Mulawarman lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, kesibukan/aktivitas yang dilakukan ialah mengajar, meneliti, menulis dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.